

Rekonstruksi Teori Komunikasi Organisasi dalam Era Digital dan Disrupsi Informasi: Studi Literatur

Heri Wahyudi Marpaung^{1*}, Hasnun Jauhari Ritonga²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: heri4004243025@uinsu.ac.id¹, hasnunjauhariritonga@uinsu.ac.id²

Article History:

Received: 15 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 30 Januari 2026

Keywords: *Organizational communication theory, Digitalization, Information Disruption, Digital Platforms, Systematic Literature Review*

Abstract: *This study aims to: 1) identify the development of organizational communication theory in the context of digitalization and information disruption; 2) analyze the limitations of classical organizational communication theory in explaining algorithm-based communication and digital platforms; and 3) formulate a framework for reconstructing organizational communication theory that is more adaptive to the digital era. The study uses a qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA protocol for indexed scientific articles from 2015–2024. The analysis is conducted through a thematic approach to map paradigm shifts and conceptual synthesis in contemporary organizational communication studies. The results show that: 1) Organizational communication theory has undergone a significant transformation from a structural-hierarchical paradigm to a digital-network paradigm; 2) Classical theories such as the linear transmission model and systems theory have limitations because they have not integrated the role of algorithms, digital platforms, and non-human actors in the communication process. In the Digital Ecosystem, the distribution of organizational messages is influenced by algorithmic logic, the attention economy, and the dynamics of online publics that are open and cannot be fully controlled by institutions; and 3) The framework for reconstructing organizational communication theory is based on three main Principles: network communication, Algorithmic Integration, and the Digital Ecosystem perspective. This reconstruction confirms that organizational communication in the digital era is hybrid and interdependent between humans, technology, and platform structures. These findings provide theoretical implications for broadening the scope of organizational communication analysis, as well as practical implications for organizations in managing reputation and communication strategies amidst the complexity of information disruption.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem komunikasi global. Transformasi ini ditandai dengan hadirnya media sosial, *artificial intelligence* (AI), big data, serta sistem algoritma yang mengatur distribusi dan visibilitas informasi di ruang publik digital. Dalam konteks global, komunikasi tidak lagi berlangsung secara linear dan

hierarkis, melainkan dalam bentuk jaringan yang multidireksional, *real-time*, dan terdesentralisasi (Castells, 2015). Organisasi, baik publik maupun privat, kini beroperasi dalam apa yang disebut sebagai *platform society*, di mana interaksi komunikasi dipengaruhi oleh logika algoritmik yang menentukan bagaimana pesan disebarkan dan diterima (Van Dijck, Poell, & De Waal, 2018).

Di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya disinformasi dan misinformasi yang berdampak pada reputasi organisasi dan kepercayaan publik. Fenomena ini bahkan dikategorikan sebagai ancaman global terhadap stabilitas sosial dan institusional menempatkan disinformasi sebagai salah satu risiko global utama dalam dekade ini (Forum, n.d.; U.N.E.S.C.O., 2021; Wardle & Derakhshan, 2017a). Dalam situasi tersebut, komunikasi organisasi tidak lagi sekadar persoalan penyampaian pesan internal dan eksternal, melainkan juga pengelolaan persepsi publik dalam ruang digital yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri.

Secara teoretis, teori komunikasi organisasi klasik berkembang dalam konteks komunikasi yang relatif stabil dan terstruktur. Model transmisi informasi, teori sistem organisasi, serta pendekatan struktural-fungsional menekankan alur komunikasi formal, hierarki, dan kontrol manajerial (Littlejohn & Foss, K, 2011). Namun, realitas komunikasi digital menunjukkan pergeseran paradigma menuju komunikasi jaringan (*networked communication*) yang melibatkan interaksi simultan antara berbagai aktor manusia dan non-manusia (Castells, 2015; Couldry & Hepp, 2017). Dalam ekosistem digital, algoritma berperan sebagai aktor yang memediasi pesan, menentukan framing, bahkan memengaruhi pembentukan opini publik terhadap organisasi (Hepp, 2020).

Masalah umum yang muncul adalah ketidaksesuaian antara kerangka teori komunikasi organisasi klasik dengan dinamika komunikasi digital kontemporer. Banyak teori belum mengintegrasikan dimensi algoritmik, platformisasi komunikasi, serta keterlibatan publik digital sebagai bagian integral dari proses komunikasi organisasi. Akibatnya, fenomena seperti krisis reputasi akibat viralitas media sosial, pembentukan echo chamber, serta intervensi bot dalam diskursus publik belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara komprehensif dalam kerangka teori yang ada (Bennett & Livingston, 2018).

Berdasarkan observasi awal terhadap literatur komunikasi organisasi periode 2015–2024, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi empiris mengenai efektivitas komunikasi digital tanpa melakukan rekonstruksi konseptual terhadap teori yang mendasarinya. Studi-studi tersebut umumnya mengkaji penggunaan media sosial dalam organisasi, manajemen krisis digital, atau strategi komunikasi daring, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan teori jaringan, teori mediatization, dan teori algoritma ke dalam bangunan teori komunikasi organisasi secara utuh (Hepp, 2020). Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menyusun sintesis teoretis yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori klasik dan realitas komunikasi digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami transformasi komunikasi di era digital. Castells (2015) melalui konsep *network society* menjelaskan bahwa kekuasaan komunikasi dalam era digital berbasis pada struktur jaringan global. Couldry dan Hepp memperkenalkan konsep *mediated construction of reality* yang menekankan bahwa realitas sosial, termasuk realitas organisasi, kini dibentuk melalui proses mediasi digital yang mendalam (Couldry & Hepp, 2017; Hepp, 2020). Van Dijck et al., (2018) menjelaskan bagaimana platform digital membentuk struktur komunikasi melalui mekanisme algoritmik yang terinstitusionalisasi. Sementara itu, Hepp mengembangkan konsep *deep mediatization* yang menunjukkan bahwa organisasi modern tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur digital yang membentuk praktik komunikasi mereka (Hepp, 2020). Namun demikian, studi-studi tersebut lebih

.....

berfokus pada transformasi media dan masyarakat secara umum, belum secara spesifik merekonstruksi teori komunikasi organisasi sebagai kerangka konseptual yang komprehensif.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa *research gap* yang dapat diidentifikasi. Pertama, belum tersedia model rekonstruksi teori komunikasi organisasi yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi algoritma dan aktor non-manusia sebagai bagian dari proses komunikasi. Kedua, dominasi studi empiris belum diimbangi dengan pengembangan kerangka teoretis baru yang sistematis. Ketiga, masih minim penelitian berbasis *Systematic Literature Review* yang memetakan pergeseran paradigma komunikasi organisasi dalam era disrupsi informasi. Keempat, integrasi antara teori komunikasi organisasi klasik dengan teori jaringan, teori platform, dan teori mediatization belum dilakukan secara komprehensif.

Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan teori komunikasi organisasi dalam konteks digitalisasi dan disrupsi informasi, menganalisis keterbatasan teori klasik dalam menjelaskan komunikasi berbasis algoritma dan platform digital, serta merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi organisasi yang lebih adaptif terhadap era digital. Melalui pendekatan studi literatur sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa sintesis konseptual yang relevan bagi pengembangan ilmu komunikasi organisasi kontemporer.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada transformasi teori komunikasi organisasi dalam konteks digitalisasi dan disrupsi informasi. Pada awalnya, teori komunikasi organisasi klasik berakar pada pendekatan struktural-fungsional dan teori sistem, yang menekankan stabilitas, hierarki, dan alur komunikasi formal. Model transmisi informasi klasik, seperti yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver, menganggap komunikasi sebagai alur satu arah yang dapat diprediksi dan dikendalikan oleh organisasi. Namun, dalam era digital, perubahan paradigma terjadi, yang mencerminkan pergeseran menuju komunikasi yang lebih dinamis dan terdesentralisasi. Dalam kajian kontemporer, definisi ini diperluas dengan mempertimbangkan peran media digital sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik komunikasi organisasi modern (Sasmita, Hafida, & Zhafira, 2025). Pendekatan klasik seperti model komunikasi satu arah kini kurang relevan dalam konteks digital yang menekankan interaksi dua arah, partisipasi stakeholder, serta respons cepat terhadap isu internal dan eksternal (Arfan et al., 2025). Penelitian terbaru menekankan pentingnya komunikasi virtual yang dinamis, interaktif, dan strategis dalam menjaga hubungan kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta membangun citra organisasi secara efektif dalam lingkungan digital. Castells, (2015) dalam teori *network society* mengemukakan bahwa kekuasaan komunikasi kini terletak pada kemampuan untuk mengelola jaringan informasi, di mana organisasi berfungsi sebagai bagian dari jaringan global yang saling terhubung, yang memungkinkan komunikasi lebih multidireksional dan interaktif.

Selanjutnya, *teori deep mediatization* yang dikembangkan oleh Hepp, (2020) menyatakan bahwa mediasi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga membentuk struktur sosial dan organisasi itu sendiri. Teknologi, termasuk algoritma dan kecerdasan buatan, kini menjadi bagian integral dari proses komunikasi organisasi, sehingga komunikasi tidak hanya melibatkan relasi antar-manusia, tetapi juga interaksi dengan sistem algoritmik yang memediasi pesan. Teori *platform society* dari Van Dijck, Poell, & De Waal, (2018) juga sangat relevan dalam konteks ini, karena platform digital kini mendominasi ruang publik, dengan algoritma yang mengatur visibilitas dan jangkauan pesan organisasi. Hal ini menambah kompleksitas komunikasi organisasi karena distribusi pesan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi, melainkan dipengaruhi oleh

logika algoritmik yang ada di platform tersebut.

Selain itu, disrupsi informasi yang dibahas dalam teori Wardle & Derakhshan, (2017) menunjukkan tantangan besar yang dihadapi organisasi dalam mengelola reputasi dan pesan publik, mengingat penyebaran disinformasi yang dapat mengubah persepsi publik secara cepat dan tidak terkendali. Dalam hal ini, teori mediatization dari Couldry & Hepp, (2017) juga menyoroti bagaimana media digital dan platform mempengaruhi konstruksi realitas sosial, termasuk dalam organisasi, yang semakin sulit dipisahkan dari infrastruktur digital. Terakhir, teori algoritma dari Van Dijck, Poell, & De Waal, (2018) menekankan bahwa algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi informasi, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan siapa yang melihat pesan dan bagaimana pesan tersebut dibingkai, menjadikan komunikasi organisasi lebih kompleks dan bergantung pada sistem digital yang ada. Oleh karena itu, teori komunikasi organisasi perlu direkonstruksi agar dapat menjawab tantangan baru yang muncul dalam era digital dan disrupsi informasi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merekonstruksi teori komunikasi organisasi dalam konteks era digital dan disrupsi informasi, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap perkembangan literature (Creswell, J W., Creswell, 2018). Metode SLR digunakan untuk memastikan kajian dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur (Snyder, 2019).

Proses penelitian mengacu pada protokol PRISMA yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel (Page et al., 2021). Sumber data berupa artikel jurnal terindeks Scopus, Web of Science, dan Sinta 1–2 yang terbit pada periode 2015–2024, guna menangkap perkembangan mutakhir komunikasi organisasi dalam era digital (Hepp, 2020).

Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti *organizational communication theory, digital transformation, networked communication, dan algorithmic communication*, dengan kombinasi operator Boolean. Artikel diseleksi berdasarkan kriteria relevansi teoretis, proses *peer-review*, dan ketersediaan *full text*.

Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan kategori konseptual dalam literature (Braun & Clarke, 2019). Tema-tema utama kemudian disintesis untuk merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi organisasi yang mengintegrasikan perspektif komunikasi jaringan, platform digital, dan mediatization (Castells, 2015; Van Dijck et al., 2018). Keabsahan penelitian dijaga melalui dokumentasi sistematis proses seleksi literatur dan triangulasi sumber (Creswell, J W., Creswell, 2018). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan sintesis teoretis yang relevan terhadap pergeseran paradigma komunikasi organisasi dalam era disrupsi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teori Komunikasi Organisasi dalam Konteks Digitalisasi dan Disrupsi Informasi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa teori komunikasi organisasi mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Pergeseran ini tidak hanya bersifat teknis yakni perubahan medium komunikasi melainkan menyentuh level epistemologis dan

.....

ontologis dalam memahami bagaimana komunikasi organisasi bekerja. Jika pada fase awal teori komunikasi organisasi berakar pada pendekatan struktural-fungsional dan teori sistem yang menekankan stabilitas, hierarki, serta alur komunikasi formal, maka dalam era digital terjadi transformasi menuju model komunikasi jaringan (*networked communication*) yang lebih dinamis, terbuka, dan terdesentralisasi (Littlejohn & Foss, K, 2011).

a. Fase Klasik: Stabilitas, Hierarki, dan Rasionalitas Organisasi

Pada periode awal perkembangannya, teori komunikasi organisasi dipengaruhi oleh paradigma manajemen ilmiah dan pendekatan struktural-fungsional. Organisasi dipahami sebagai sistem rasional yang terdiri atas struktur formal, pembagian kerja, dan jalur komunikasi yang jelas. Komunikasi berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrol untuk menjaga efisiensi organisasi. Dalam kerangka ini, komunikasi cenderung bersifat vertikal (*top-down* dan *bottom-up*) serta mengikuti rantai komando yang telah ditentukan. (Littlejohn & Foss, K, 2011)

Teori sistem kemudian memperluas perspektif ini dengan memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, meskipun teori sistem mengakui adanya pertukaran informasi dengan lingkungan eksternal, asumsi dasarnya tetap menempatkan organisasi sebagai entitas yang relatif stabil dan mampu mengontrol arus komunikasinya. Lingkungan dipahami sebagai faktor eksternal yang dapat diprediksi dan dikelola.

Dalam konteks tersebut, komunikasi organisasi diposisikan sebagai proses penyampaian pesan yang relatif linear dan dapat direncanakan. Model-model transmisi informasi seperti Shannon dan Weaver memperkuat asumsi bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari sumber ke penerima melalui saluran tertentu dengan gangguan (*noise*) yang dapat diminimalkan. Paradigma ini cukup relevan dalam konteks komunikasi berbasis media tradisional yang bersifat satu arah dan terpusat.

b. Transformasi Menuju Masyarakat Jaringan (*Network society*)

Memasuki era digital, struktur komunikasi mengalami perubahan radikal. Konsep *network society* yang dikemukakan Castells, (2015) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat kontemporer terletak pada kemampuan mengelola jaringan informasi. Dalam konteks organisasi, hal ini berarti bahwa otoritas komunikasi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh posisi struktural, melainkan oleh posisi dalam jaringan komunikasi digital.

Organisasi kini tidak lagi berdiri sebagai entitas tertutup dengan batas yang jelas, melainkan sebagai simpul (*node*) dalam jaringan global yang saling terhubung. Media sosial, platform digital, dan teknologi komunikasi berbasis internet memungkinkan interaksi simultan antara aktor internal dan eksternal organisasi. Karyawan, pelanggan, komunitas, bahkan individu anonim dapat berpartisipasi dalam pembentukan makna organisasi.

Dalam kondisi ini, komunikasi tidak lagi berjalan secara linear, melainkan bersifat multidireksional dan interaktif. Informasi dapat mengalir dari bawah ke atas, dari luar ke dalam, bahkan melampaui struktur formal organisasi. Fenomena viralitas menunjukkan bahwa pesan organisasi dapat mengalami amplifikasi atau distorsi secara cepat di ruang digital tanpa kendali penuh dari manajemen. Hal ini menandai pergeseran dari paradigma kontrol menuju paradigma konektivitas.

c. *Deep mediatization*: Integrasi Infrastruktur Digital dalam Praktik Organisasi

Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan oleh konsep *deep mediatization* yang dikemukakan Hepp (2020). Konsep ini menegaskan bahwa mediasi digital tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur yang membentuk praktik sosial dan organisasi secara mendalam. Dalam konteks komunikasi organisasi, digitalisasi tidak hanya mengubah saluran komunikasi, tetapi juga memengaruhi budaya organisasi, pola kepemimpinan, serta relasi kekuasaan.

Digitalisasi menciptakan lingkungan komunikasi yang selalu terhubung (*always-on*)

environment), di mana batas antara komunikasi internal dan eksternal semakin kabur. Rapat daring, kolaborasi berbasis cloud, sistem manajemen digital, serta penggunaan media sosial oleh karyawan menunjukkan bahwa komunikasi organisasi telah terintegrasi dalam sistem teknologi digital. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas terpisah, melainkan sebagai praktik yang terjalin dalam ekosistem digital yang lebih luas.

Dalam perspektif ini, organisasi tidak hanya berkomunikasi melalui media digital, tetapi juga dikonstruksi oleh media digital itu sendiri. Infrastruktur digital membentuk cara organisasi memproduksi, menyebarkan, dan memonitor informasi. Ini menandai perubahan ontologis dalam memahami organisasi sebagai entitas yang “termediasi secara mendalam.”

d. *Platform society* dan Logika Algoritmik

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh munculnya konsep *platform society*. Konsep ini menegaskan bahwa ruang publik digital kini didominasi oleh platform yang beroperasi berdasarkan logika algoritmik dan ekonomi data (Van Dijck et al., 2018). Dalam konteks komunikasi organisasi, hal ini berarti bahwa distribusi pesan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali organisasi, melainkan dipengaruhi oleh algoritma yang menentukan visibilitas dan jangkauan konten.

Algoritma media sosial memprioritaskan konten berdasarkan interaksi, relevansi, dan kepentingan komersial platform. Dengan demikian, pesan organisasi dapat mengalami modifikasi dalam proses distribusi. Pesan yang dirancang untuk komunikasi internal dapat menjadi konsumsi publik; sebaliknya, pesan eksternal dapat diinterpretasikan ulang oleh audiens digital. Situasi ini menciptakan kompleksitas baru dalam manajemen komunikasi organisasi.

Dalam ekosistem platform, komunikasi organisasi tidak hanya bersifat relasional, tetapi juga datafikatif. Setiap interaksi menghasilkan data yang dapat dianalisis dan dimonetisasi. Organisasi harus memahami logika algoritmik untuk menjaga reputasi dan efektivitas komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa teori komunikasi organisasi perlu mengintegrasikan dimensi teknologi dan algoritma sebagai bagian dari struktur komunikasi.

e. Dari Model Linear-Hierarkis Menuju Ekosistem Digital

Berdasarkan sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teori komunikasi organisasi bergerak dari model linear-hierarkis menuju model ekosistem digital yang kompleks dan berbasis jaringan. Jika paradigma lama menekankan kontrol, stabilitas, dan prediktabilitas, maka paradigma baru menekankan konektivitas, interaktivitas, dan adaptivitas.

Disrupsi informasi termasuk fenomena disinformasi dan polarisasi digital semakin mempertegas kebutuhan perubahan paradigma ini (Wardle & Derakhshan, 2017a). Organisasi tidak lagi dapat mengandalkan komunikasi satu arah untuk membentuk opini publik. Sebaliknya, organisasi harus mampu berpartisipasi dalam percakapan digital yang terbuka dan sering kali tidak terduga.

Dengan demikian, perkembangan teori komunikasi organisasi dalam era digital menunjukkan pergeseran dari pendekatan struktural menuju pendekatan jaringan-digital yang integratif. Organisasi dipahami sebagai bagian dari ekosistem komunikasi yang melibatkan manusia, teknologi, dan platform digital secara simultan. Transformasi ini menuntut rekonstruksi teoretis agar teori komunikasi organisasi mampu menjelaskan realitas komunikasi berbasis algoritma dan disrupsi informasi secara komprehensif.

Keterbatasan Teori Komunikasi Organisasi Klasik dalam Konteks Algoritma dan Platform Digital

Analisis literatur menunjukkan bahwa teori komunikasi organisasi klasik menghadapi tantangan serius dalam menjelaskan realitas komunikasi berbasis algoritma dan platform digital.

.....

Keterbatasan ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, melainkan pada asumsi dasar ontologis dan epistemologis yang mendasari teori-teori tersebut. Paradigma klasik dibangun dalam konteks komunikasi yang relatif stabil, terpusat, dan dapat dikendalikan oleh organisasi. Sementara itu, komunikasi digital kontemporer berlangsung dalam ekosistem jaringan yang terbuka, dinamis, dan dipengaruhi oleh aktor non-manusia seperti algoritma dan sistem otomatisasi.

a. Keterbatasan Model Transmisi Linear

Model transmisi informasi seperti yang dikembangkan oleh Shannon dan Weaver berangkat dari asumsi bahwa komunikasi adalah proses linear: pesan dikirim oleh pengirim melalui saluran tertentu kepada penerima dengan kemungkinan gangguan (*noise*) yang dapat diminimalkan. Model ini sangat berpengaruh dalam perkembangan teori komunikasi organisasi awal karena memberikan kerangka rasional dan sistematis dalam memahami alur pesan.

Namun, dalam konteks komunikasi digital, model linear ini menjadi problematis. Pertama, ia mengasumsikan relasi satu arah antara pengirim dan penerima, sementara komunikasi media sosial bersifat multidireksional dan interaktif. Kedua, model ini tidak mempertimbangkan peran aktor non-manusia seperti algoritma yang secara aktif memediasi proses distribusi pesan. Dalam ruang digital, pesan organisasi tidak langsung diterima oleh audiens sebagaimana dikirimkan, melainkan melalui proses kurasi algoritmik yang menentukan siapa yang melihat pesan tersebut (Van Dijck et al., 2018).

Dengan demikian, konsep “*noise*” dalam model klasik tidak lagi sekadar gangguan teknis, tetapi dapat berupa manipulasi algoritmik, misinformasi, atau framing ulang oleh pengguna lain. Model transmisi linear tidak mampu menjelaskan bagaimana pesan organisasi dapat mengalami amplifikasi atau distorsi secara viral di luar kendali pengirim.

b. Keterbatasan Teori Sistem dalam Mengintegrasikan Dimensi Algoritmik

Teori sistem organisasi memperluas perspektif komunikasi dengan melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini mengakui adanya pertukaran informasi dan umpan balik (*feedback*) sebagai bagian dari proses adaptasi organisasi (Littlejohn & Foss, K, 2011). Namun, teori sistem klasik tetap menempatkan organisasi sebagai aktor utama yang relatif mampu mengelola interaksi dengan lingkungannya.

Dalam konteks platform digital, asumsi ini menjadi kurang relevan. Algoritma media sosial berfungsi sebagai mediator aktif yang memfilter, memprioritaskan, bahkan mbingkai pesan organisasi berdasarkan logika komersial dan keterlibatan pengguna. Dengan kata lain, lingkungan komunikasi digital bukanlah entitas netral, melainkan struktur yang dikendalikan oleh sistem algoritmik (Van Dijck et al., 2018).

Teori sistem klasik belum secara eksplisit mengintegrasikan algoritma sebagai bagian dari struktur komunikasi organisasi. Algoritma bukan sekadar saluran, melainkan aktor yang memiliki dampak struktural terhadap distribusi dan makna pesan. Dalam konteks ini, organisasi tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses komunikasi karena harus bernegosiasi dengan logika platform yang berbasis data dan ekonomi perhatian.

c. Disrupsi Informasi dan Krisis Kontrol Institusional

Fenomena disinformasi dan polarisasi digital semakin memperjelas keterbatasan teori klasik. Wardle dan Derakhshan menunjukkan bahwa ekosistem digital memungkinkan penyebaran informasi palsu secara cepat dan masif, sering kali melampaui klarifikasi resmi dari organisasi (Wardle & Derakhshan, 2017a). Dalam situasi ini, pesan organisasi dapat direproduksi, dimodifikasi, atau dipelintir oleh aktor lain, termasuk bot dan jaringan disinformasi terorganisasi.

Bennett dan Livingston menyebut kondisi ini sebagai era disrupsi informasi, yang ditandai oleh melemahnya kontrol institusional terhadap arus komunikasi publik. Organisasi tidak lagi menjadi satu-satunya produsen makna mengenai dirinya sendiri. Publik digital memiliki kapasitas

untuk membentuk narasi alternatif yang dapat memengaruhi reputasi organisasi secara signifikan (Bennett & Livingston, 2018).

Teori komunikasi organisasi klasik yang berbasis pada kontrol struktural dan komunikasi formal tidak mampu menjelaskan dinamika ini. Dalam paradigma lama, manajemen komunikasi dianggap mampu merancang pesan strategis dan mengontrol penyampaiannya. Namun, dalam ekosistem digital, pesan dapat menjadi viral secara tak terduga dan menghasilkan konsekuensi reputasional yang luas.

d. Reduksi Peran Aktor Non-Manusia

Salah satu keterbatasan mendasar teori klasik adalah reduksi komunikasi pada relasi antar-manusia. Perspektif ini mengabaikan peran teknologi sebagai aktor yang memiliki daya mediasi. Dalam realitas digital, algoritma, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi sebagai bagian dari struktur komunikasi itu sendiri.

Konsep *platform society* menegaskan bahwa arsitektur digital membentuk praktik komunikasi melalui aturan dan kebijakan yang tertanam dalam sistem teknologi (Van Dijck et al., 2018). Algoritma menentukan visibilitas pesan, membangun gelembung informasi (filter bubbles), serta memengaruhi pola interaksi publik. Dengan demikian, komunikasi organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi manajerial, tetapi juga oleh desain teknologis platform.

Teori klasik belum menyediakan perangkat konseptual untuk memahami interaksi antara manusia dan algoritma dalam proses komunikasi. Padahal, dalam praktiknya, komunikasi organisasi kini berlangsung dalam ruang hibrid yang melibatkan interaksi simultan antara aktor manusia dan non-manusia.

e. Kompleksitas Viralitas dan Ekonomi Perhatian

Keterbatasan lain teori klasik terletak pada ketidakmampuannya menjelaskan fenomena viralitas dan ekonomi perhatian. Dalam ekosistem digital, perhatian publik menjadi komoditas utama. Platform digital dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna melalui sistem rekomendasi berbasis algoritma. Hal ini menciptakan dinamika komunikasi yang tidak selalu rasional atau terstruktur.

Pesan organisasi dapat menjadi viral bukan karena relevansi strategisnya, tetapi karena resonansi emosional atau kontroversinya. Situasi ini menantang asumsi klasik bahwa komunikasi organisasi dapat direncanakan dan dikontrol secara sistematis. Dalam realitas digital, komunikasi bersifat emergen, tidak terduga, dan sering kali dipengaruhi oleh dinamika kolektif pengguna.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori komunikasi organisasi klasik memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek utama:

- 1) Berbasis pada model linear dan hierarkis yang tidak sesuai dengan komunikasi jaringan.
- 2) Mengabaikan peran algoritma dan teknologi sebagai aktor non-manusia.
- 3) Mengasumsikan kontrol institusional yang stabil terhadap arus komunikasi.
- 4) Tidak mampu menjelaskan dinamika viralitas, disinformasi, dan ekonomi perhatian.

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi teoretis yang mengintegrasikan dimensi algoritmik, jaringan digital, serta ekosistem platform sebagai bagian dari struktur komunikasi organisasi. Tanpa integrasi ini, teori komunikasi organisasi akan kesulitan menjelaskan kompleksitas komunikasi dalam era disrupsi informasi.

Rekonstruksi Teori Komunikasi Organisasi yang Adaptif terhadap Era Digital

Berdasarkan sintesis tematik terhadap literatur, penelitian ini merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi organisasi yang lebih adaptif terhadap era digital dan disrupsi informasi. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan teori klasik, melainkan untuk memperluas dan mentransformasikan kerangka konseptual yang ada agar mampu menjelaskan

.....

dinamika komunikasi dalam ekosistem digital yang kompleks. Transformasi ini berangkat dari kesadaran bahwa komunikasi organisasi kini berlangsung dalam ruang jaringan yang terhubung, termediasi oleh algoritma, serta dipengaruhi oleh struktur ekonomi-politik platform digital (Castells, 2015; Hepp, 2020; Van Dijck et al., 2018).

Rekonstruksi teoretis ini bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu prinsip komunikasi jaringan, prinsip integrasi algoritmik, dan prinsip ekosistem digital. Ketiga prinsip ini saling terkait dan membentuk fondasi paradigma baru komunikasi organisasi yang bersifat jaringan-digital.

a. Prinsip Komunikasi Jaringan (*Networked communication Principle*)

Prinsip pertama menempatkan organisasi sebagai simpul (*node*) dalam jaringan komunikasi digital yang multidireksional. Dalam paradigma klasik, komunikasi organisasi dipahami sebagai proses vertikal yang mengalir dari pimpinan ke bawahan atau sebaliknya. Struktur formal menjadi penentu utama arus informasi. Namun, dalam era *network society*, kekuasaan komunikasi terletak pada kemampuan membangun dan mengelola jaringan informasi (Castells, 2015).

Organisasi tidak lagi beroperasi sebagai entitas tertutup, tetapi sebagai bagian dari jaringan global yang menghubungkan karyawan, pelanggan, mitra, komunitas, serta publik digital. Media sosial memungkinkan interaksi simultan antara aktor internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi sekadar instrumen manajerial, melainkan proses kolaboratif dan partisipatif.

Dalam kerangka ini, konsep otoritas komunikasi mengalami redefinisi. Otoritas tidak lagi hanya bersumber dari posisi struktural, tetapi juga dari kredibilitas, konektivitas, dan kemampuan membangun relasi dalam jaringan. Individu di dalam organisasi dapat menjadi pusat pengaruh komunikasi melalui aktivitas digitalnya. Hal ini menuntut organisasi untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih dialogis dan terbuka.

Prinsip komunikasi jaringan juga menekankan bahwa makna organisasi tidak sepenuhnya dikonstruksi secara internal, melainkan melalui interaksi dalam jaringan publik digital. Identitas organisasi menjadi hasil negosiasi antara pesan resmi dan interpretasi publik. Dengan demikian, teori komunikasi organisasi perlu mengintegrasikan perspektif jaringan sebagai struktur utama komunikasi kontemporer.

b. Prinsip Integrasi Algoritmik (*Algorithmic Integration Principle*)

Prinsip kedua mengakui bahwa algoritma dan sistem digital merupakan aktor non-manusia yang turut membentuk struktur komunikasi organisasi. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *deep mediatization* yang menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari praktik sosial (Hepp, 2020). Dalam konteks ini, komunikasi organisasi tidak hanya melibatkan relasi antar-manusia, tetapi juga interaksi antara manusia dan sistem algoritmik.

Algoritma media sosial berfungsi sebagai kurator informasi yang menentukan visibilitas, jangkauan, dan prioritas pesan. Dengan demikian, distribusi pesan organisasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh strategi komunikasi internal, melainkan dipengaruhi oleh logika teknologis platform (Van Dijck et al., 2018). Algoritma dapat memperkuat pesan tertentu, mengabaikan pesan lain, atau membentuk filter bubbles yang membatasi jangkauan komunikasi.

Integrasi algoritmik dalam teori komunikasi organisasi berarti mengakui bahwa struktur komunikasi kini bersifat hibrid. Organisasi harus memahami bagaimana sistem rekomendasi, analitik data, dan kecerdasan buatan memengaruhi interaksi publik. Keputusan komunikasi tidak lagi hanya didasarkan pada pertimbangan retorik atau manajerial, tetapi juga pada pemahaman terhadap logika algoritmik.

Prinsip ini juga mengubah cara memahami umpan balik (*feedback*). Dalam paradigma klasik, umpan balik berasal dari respons audiens yang dapat diukur melalui survei atau evaluasi formal.

Dalam ekosistem digital, umpan balik terjadi secara *real-time* melalui komentar, likes, shares, dan analitik data. Data tersebut kemudian diproses oleh algoritma untuk menentukan distribusi pesan selanjutnya. Dengan demikian, komunikasi organisasi berlangsung dalam siklus algoritmik yang terus-menerus.

c. Prinsip Ekosistem Digital (*Digital Ecosystem Principle*)

Prinsip ketiga memandang komunikasi organisasi sebagai bagian dari ekosistem platform yang dipengaruhi oleh logika ekonomi-politik media digital. Konsep *platform society* menunjukkan bahwa ruang publik digital didominasi oleh platform yang beroperasi berdasarkan kepentingan komersial dan pengelolaan data (Van Dijck et al., 2018). Oleh karena itu, komunikasi organisasi tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi dan kebijakan platform tersebut.

Dalam ekosistem digital, organisasi bersaing dalam ekonomi perhatian (*attention economy*). Visibilitas pesan ditentukan oleh interaksi pengguna dan prioritas algoritmik. Hal ini menciptakan dinamika komunikasi yang sering kali tidak sepenuhnya rasional atau dapat diprediksi. Viralitas dapat muncul dari resonansi emosional, kontroversi, atau dinamika komunitas digital.

Prinsip ekosistem digital menegaskan bahwa komunikasi organisasi harus dipahami sebagai praktik yang terhubung dengan reputasi daring, manajemen krisis digital, serta partisipasi publik dalam ruang terbuka. Organisasi tidak lagi hanya mengelola komunikasi internal, tetapi juga harus memonitor dan merespons percakapan publik yang berlangsung di berbagai platform.

Dengan demikian, teori komunikasi organisasi perlu mengintegrasikan analisis struktur platform, regulasi digital, serta dinamika ekonomi data sebagai bagian dari kerangka konseptualnya. Tanpa integrasi ini, teori akan gagal menjelaskan kompleksitas komunikasi dalam era disrupsi informasi.

d. Model Paradigma Jaringan-Digital

Rekonstruksi teori ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dalam era digital bersifat hibrid, melibatkan interaksi antara manusia, teknologi, dan struktur platform. Organisasi dipahami sebagai simpul dalam jaringan yang termediasi oleh algoritma dan beroperasi dalam ekosistem digital yang kompetitif.

Paradigma jaringan-digital menggantikan paradigma struktural-hierarkis dengan asumsi bahwa:

- 1) Komunikasi bersifat multidireksional dan partisipatif.
- 2) Algoritma berfungsi sebagai aktor struktural dalam distribusi pesan.
- 3) Identitas organisasi dikonstruksi melalui interaksi dalam jaringan publik digital.
- 4) Kontrol komunikasi bersifat relatif dan harus dinegosiasikan dalam ekosistem platform.

Transformasi ini menuntut pendekatan teoretis yang integratif, yang menggabungkan teori jaringan, mediatization, serta analisis platform digital (Castells, 2015; Hepp, 2020; Van Dijck et al., 2018). Rekonstruksi ini bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan perubahan paradigma dalam memahami hakikat komunikasi organisasi.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori komunikasi organisasi perlu bertransformasi dari paradigma struktural menuju paradigma jaringan-digital yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika informasi global. Rekonstruksi ini memberikan kontribusi teoretis dengan:

- 1) Mengintegrasikan aktor non-manusia dalam struktur komunikasi organisasi.
- 2) Menggeser fokus dari kontrol komunikasi menuju pengelolaan jaringan dan reputasi digital.
- 3) Memahami komunikasi sebagai proses hibrid dalam ekosistem platform.

Dengan demikian, teori komunikasi organisasi yang adaptif terhadap era digital harus mampu menjelaskan kompleksitas interaksi manusia-teknologi, dinamika algoritmik, serta disrupsi informasi yang memengaruhi praktik organisasi kontemporer.

.....

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori komunikasi organisasi mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam konteks digitalisasi dan disrupsi informasi. Perkembangan teknologi digital, media sosial, serta sistem algoritmik telah mengubah secara fundamental struktur, proses, dan dinamika komunikasi organisasi. Jika teori klasik berakar pada pendekatan struktural-hierarkis yang menekankan stabilitas, kontrol, dan alur komunikasi formal, maka realitas komunikasi kontemporer menunjukkan karakter yang lebih cair, multidireksional, dan berbasis jaringan.

Hasil kajian literatur mengidentifikasi bahwa teori komunikasi organisasi klasik memiliki keterbatasan dalam menjelaskan komunikasi berbasis algoritma dan platform digital. Model transmisi linear dan teori sistem tradisional belum mengintegrasikan peran aktor non-manusia seperti algoritma, bot, dan sistem kecerdasan buatan dalam proses distribusi serta konstruksi makna pesan. Dalam ekosistem platform digital, pesan organisasi tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali manajemen, melainkan dipengaruhi oleh logika algoritmik yang menentukan visibilitas dan jangkauan komunikasi. Fenomena disinformasi, polarisasi digital, dan viralitas semakin menegaskan melemahnya kontrol institusional terhadap arus komunikasi publik.

Berdasarkan sintesis tematik, penelitian ini merumuskan kerangka rekonstruksi teori komunikasi organisasi yang adaptif terhadap era digital dengan bertumpu pada tiga prinsip utama. Pertama, prinsip komunikasi jaringan yang menempatkan organisasi sebagai simpul dalam jaringan komunikasi digital yang interaktif dan kolaboratif. Kedua, prinsip integrasi algoritmik yang mengakui algoritma sebagai aktor struktural dalam proses komunikasi. Ketiga, prinsip ekosistem digital yang memandang komunikasi organisasi sebagai bagian dari struktur ekonomi-politik platform dan dinamika publik digital.

Rekonstruksi ini menegaskan bahwa komunikasi organisasi dalam era digital bersifat hibrid, melibatkan interaksi antara manusia, teknologi, dan struktur platform secara simultan. Oleh karena itu, teori komunikasi organisasi perlu bertransformasi dari paradigma struktural-hierarkis menuju paradigma jaringan-digital yang lebih adaptif, integratif, dan kontekstual terhadap perubahan teknologi serta dinamika informasi global.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas cakupan analisis komunikasi organisasi melalui integrasi perspektif jaringan, mediatization, dan platform digital. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi harus mengembangkan strategi komunikasi yang responsif terhadap dinamika algoritmik dan percakapan publik digital, serta mampu membangun reputasi dan legitimasi dalam ekosistem informasi yang kompleks. Dengan demikian, rekonstruksi teori komunikasi organisasi bukan sekadar penyesuaian konseptual, melainkan kebutuhan epistemologis untuk memastikan relevansi ilmu komunikasi organisasi dalam menghadapi tantangan era digital dan disrupsi informasi.

DAFTAR REFERENSI

- Arfan, A., Sari, A. P. J., Rayhan, M., Afni, N., Maharani, D., Ushuluddin, F., ... Bone, I. (2025). Analisis Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Citra Organisasi di Era Digital (Studi pada Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Bone). *JISOH: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(3), 731–740.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139.
-

<https://doi.org/10.1177/0267323118760317>

- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). The mediated construction of reality. *Polity Press*. <https://doi.org/10.1017/9781316418345>
- Creswell, J W., Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition* (5th ed.). United Kingdom: Sage Publication, Inc.
- Forum, W. E. (n.d.). Global risks report 2024. *World Economic Forum*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14330.90564>
- Hepp, A. (2020). Deep mediatization. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9780429437748>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theoris of Human Communication Tenth Edition*. Wadworth.
- Sasmita, F. A., Hafida, R. N., & Zhafira, A. (2025). Analisis Peran Media Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Tengah Tantangan Disrupsi Digital Analysis of the Role of Digital Media in Increasing the Effectiveness of Organizational Communication of t. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 4(2), 175–183.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- U.N.E.S.C.O. (2021). *Journalism, fake news & disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54675/IWQB8267>
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017a). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. *Council of Europe*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29943.85920>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017b). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.
-